

**ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN PENGELUARAN BELANJA
DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN
2013-2017**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM EKONOMI ISLAM**

OLEH:

ACHMAD ROYYAN FARODIS
NIM. 15810045
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

**ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN PENGELUARAN BELANJA
DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN
2013-2017**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM EKONOMI ISLAM**

OLEH:

ACHMAD ROYYAN FARODIS

NIM. 15810045

PEMBIMBING:

MUH. RUDI NUGROHO, SE., M.SC

NIP. 19820219 201503 1 002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 550821, 512474, Fax. (0274) 586117
E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-730/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2019

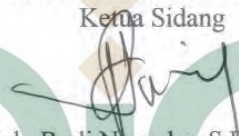
Tugas Akhir dengan judul : **“Analisis Efisiensi Pengelolaan Pengeluaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Achmad Royyan Farodis
NIM : 15810045
Telah diujikan pada : Kamis, 1 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

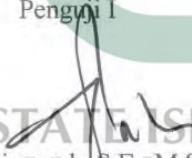
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.
NIP. 19820219 201503 1 002

Penguji I


Penguji II


Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
NIP. 19710929 200003 1 001


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 15 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
DEKAN




Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FE-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Achmad Royyan Farodis

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Achmad Royyan Farodis
NIM : 15810045
Judul : **“Analisis Efisiensi Pengelolaan Pengeluaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017”**
Skripsi

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2019

Pembimbing,

Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.

NIP. 19820219 201503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Royyan Farodis

NIM : 15810045

Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Efisiensi Pengelolaan Pengeluaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 Juli 2019

Penyusun



Achmad Royyan Farodis
NIM. 15810045

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai *civitas* akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Royyan Farodis

NIM : 15810045

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*non exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Efisiensi Pengelolaan Pengeluaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017”.

Beserta perangkat yang ada(jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penyusun atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: 17 Juli 2019

Yang menyatakan,



Achmad Royyan Farodis

MOTTO

Sabda Nabi Muhammad Saw :

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْعَلَ بِبِلْغَمٍ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَ رَفَعِيَ بِبِلْغَمٍ، وَمَنْ

أَرَادَ هُمُ فَعَلَ بِبِلْغَمٍ

Artinya :

“Barang siapa ingin hidup (bahagia) di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup di akhirat (bahagia) maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin hidup (bahagia) di dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan untuk;

Orang tua tercinta Ayahanda Taufik dan (Alm.) Ibunda Suhartini

Adik tercinta Alfina Nur Izzati dan Aulia Nur Wasila

Orang tua dari Ayah (Kakek & Nenek) H. M. Dahlan dan Hj. Ummi

Kultsum

Orang tua dari Ibu (Kakek & Nenek) Suhari dan Salma.

*Teruntuk sahabat dan semua pihak yang telah menemani berjuang
sejauh ini*

Serta

Teruntuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)

ط	Tha'	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

تَعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbuttah

Semua *ta'* marbuttah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
إلهة	Ditulis	<i>'illah</i>
الأولياءكريمة	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya'	Ditulis	A
mati		
تانسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya'	Ditulis	I
mati		
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah +	Ditulis	U
wawu mati		

فروض	Ditulis	<i>Furud</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan

Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
تَلَقَّيْتُمْ لَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

السَّامَاءُ	Ditulis	<i>As-sama'</i>
السَّيَّامِسُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“Analisis Efisiensi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017”**. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW nabi akhir zaman yang membimbing umatnya di jalan yang di ridho’i Allah SWT dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat, Aamiin.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata I Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Sunaryati, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Lailatis Syarifah Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penyusun selama menempuh pendidikannya.
5. Bapak Muh. Rudi Nugroho, SE., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar megarahkan dan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
6. Dosen penguji pertama yang telah memberikan arahan dan saran kepada penyusun ketika sidang untuk memperbaiki penelitian menjadi lebih baik.
7. Dosen penguji kedua yang telah memberikan arahan dan saran kepada penyusun ketika sidang untuk memperbaiki penelitian menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ayahanda Taufik dan (Alm.) Ibunda Suhartini yang menjadi motivasi terbesar penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir, yang senantiasa mendoakan, memberi semangat dan motivasi, hingga selesainya skripsi ini.

11. Seluruh keluarga besarku, Saudaraku adik Alfina Nur Izzati dan Aulia Nur Wasila yang selalu memberikan do'a, motivasi dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir penyusun.
12. Almamater Tercinta Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama kali membantu penyusun dalam memberikan arahan dan bimbingan selama mau masuk dunia perkuliahan.
13. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ekuilibrium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu mengadakan kegiatan positif dan bermanfaat selama penyusun menjadi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
14. Keluarga Besar Ambassador Corp angkatan 2015 yang selalu berjuang dalam mengemban amanah dan kepercayaan selama masa kepengurusan penyusun di organisasi ekstra Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
15. Keluarga Besar Ekonomi Syariah angkatan 2015 "Serawung Akrab Lan Ora Umuk (SEKAR ARUM)". Salah satu organisasi yang mengajarkan penyusun memahami arti bertoleransi, kebersamaan, dan menjadi motivasi untuk lulus serta sukses bareng-bareng.
16. Keluarga Besar HMPS Ekonomi Syariah. Organisasi intra yang menjadi tempat belajar, aktif dan sebagai wadah bagi penyusun dalam menyikapi berbagai persoalan mahasiswa, dosen dan lingkungan kampus.
17. Keluarga Besar Dinas Koperasi dan UMKM Yogyakarta yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk belajar disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab akan tugas-tugas perkantoran.

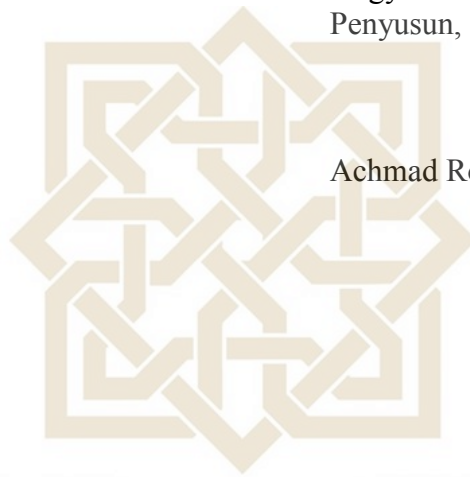
18. Keluarga Besar KKN angkatan 96 posko 300 yang pernah seap dan belajar bermasyarakat di Dusun Puyengan, Desa Kradenan, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah.
19. Teman Ngopi dan Skripsi Mbak Afifah, Zulvinka, Febria Ega, Umi Rokhimatun, Syahril, Aliya Nur Abdillah, Bayu Kiyul, Sohib, Intan, Naufi, Yuyun, Rofiqotul, Tiwi dan Adnan Azzaki.
20. Keluarga Besar Kontrakan Gayeng sejak awal Ospek/Opak sampai akhir kuliah selalu bersama-sama untuk bertempat tinggal bareng sama penyusun.
21. Keluarga Besar K-conk Mania Jogjakarta yang menjadi hiburan bagi penyusun ditengah-tengah kesibukan menjadi mahasiswa.
22. Seluruh Guru maupun Teman-teman selama menempuh pendidikan mulai dari R.A Al-Mukhlisin, MI Al-Mukhlisin, SDN Kasengan II, MtsN Sumenep, MA 1 Annuqayah, yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Terimakasih untuk ilmu yang telah diajarkan ke penyusun.
23. Semua pihak yang telah berjasa baik yang tertulis maupun yang belum sempat tertulis sehingga terselesainya skripsi ini, penyusun memohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu dan lebih spesifikasi lagi.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak luput dari kesalahan. Penyusun berharap karya tulis dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 17 Juli 2019

Penyusun,

Achmad Royyan Farodis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GRAFIK.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
INTISARI	xxvi
ABSTRACT.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11

A. Landasan Teori	11
1. Belanja Daerah	11
2. Efisiensi	13
3. Efisiensi dalam Pandangan Islam	13
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
5. Dana Alokasi Umum (DAU)	16
6. Dana Alokasi Khusus (DAK)	18
7. Belanja Modal	20
8. Belanja Pegawai	21
9. Kemiskinan	22
10. Jumlah Penduduk	23
11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	24
12. Inflasi	26
13. Jumlah Fasilitas publik	27
B. Telaah Pustaka	28
C. Kerangka Pemikiran	34
D. Pengembangan Hipotesis	35
1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia	35
2. Pengaruh PDRB terhadap efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia.	36
3. Pengaruh Inflasi terhadap efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia.	37

4. Pengaruh jumlah fasilitas publik terhadap efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Populasi dan Sampel.....	39
C. Data dan Teknik Pemerolehannya.....	40
D. Definisi Operasional Variabel	40
E. Metode Analisis.....	44
1. Metode Pengukuran Efisiensi dengan Metode <i>Stochastic Frontier Analysis</i> (SFA).....	44
2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Belanja Daerah Menggunakan Model Regresi Data Panel.....	47
BAB VI HASIL PENELITIAN.....	52
A. Deskripsi Umum Penelitian.....	52
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	54
1. Jumlah Penduduk.....	54
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	55
3. Inflasi.....	56
4. Jumlah Fasilitas Publik.....	57
5. Efisiensi Belanja Daerah	58
C. Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan Metode SFA	59
D. Analisis Efisiensi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia	71

E.	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi dan Jumlah Fasilitas Publik terhadap Tingkat Efisiensi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Menggunakan Regresi Data Panel.....	75
1.	Uji Pemilihan Model	75
2.	Hasil Estimasi Fixed Effect Model.....	77
3.	Pengujian Hipotesis	79
4.	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Efisiensi Belanja Daerah	81
5.	Pengaruh PDRB terhadap Efisiensi belanja daerah.....	82
6.	Pengaruh Inflasi terhadap Efisiensi belanja daerah	83
7.	Pengaruh jumlah fasilitas pendidikan terhadap Efisiensi belanja daerah	83
F.	Pandangan Islam terhadap Hasil Penelitian	84
BAB V	PENUTUP	86
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rata-rata Efisiensi Belanja Daerah pada 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017	70
Tabel 4.2 Realisasi DAU Provinsi Indonesia Tahun 2013-2017	73
Tabel 4.3 Realisasi DAK Provinsi Indonesia Tahun 2013-2017	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow	76
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman	76
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Model Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Efisiensi Belanja Daerah	77
Tabel 4.7 Hasil Uji F	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	80



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Pengeluaran Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Indonesia 2013-2017 (Juta Rupiah)	3
Grafik 1.2 Presentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk pada Provinsi Indonesia 2013-2017 (Juta Rupiah)	5
Grafik 4.1 Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Pulau Sumatera	60
Grafik 4.2 Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Pulau Jawa	62
Grafik 4.3 Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Pulau Kalimantan	63
Grafik 4.4 Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Pulau Bali dan Nusa Tenggara	65
Grafik 4.5 Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Pulau Sulawesi	66
Grafik 4.6 Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Pulau Maluku dan Papua	68
Grafik 4.7 Realisasi PAD pemerintah provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017....	72
Grafik 4.8 Realisasi Belanja Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017 (Juta)	74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	35
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Penelitian Terdahulu.....	i
Lampiran 2: data penelitian <i>Input</i> dan <i>Output</i>	ix
Lampiran 3: data penelitian X dan Y	xxiii
Lampiran 4: Hasil <i>Output Stochastic Frontier Approach</i> (SFA).....	xxxiii
Lampiran 5: <i>Common Effect Model</i>	xlii



INTISARI

Pengelolaan pengeluaran belanja daerah merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat diproksikan dengan jumlah penduduk miskin. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Sehingga berdampak pada pengelolaan pengeluaran belanja daerah yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Stochastic Frontier Approach* (SFA). Kemudian dari hasil nilai efisiensi SFA dilakukan uji regresi data panel dengan menggunakan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai efisiensi pengelolaan belanja daerah.

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan SFA menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisien belanja daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2013-2017 tidak mencapai nilai efisiensi yang sempurna. Kemudian hasil dari regresi data panel menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah penduduk, PDRB, inflasi dan jumlah fasilitas publik berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah dengan R-Square sebesar 98%. Sedangkan secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi belanja daerah. Kemudian variabel jumlah penduduk, inflasi dan jumlah fasilitas publik tidak berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah.

Kata kunci: Belanja daerah, efisien, jumlah penduduk, PDRB, inflasi, dan jumlah fasilitas publik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Management of regional expenditure is a government step in improving people's welfare. Indicators of the level of welfare of the community are proxied by the number of poor people. Increasing the welfare of the community will affect the decline in the number of poor people. So that it affects the management of efficient regional expenditure. This study aims to analyze the efficiency of managing regional expenditure in provincial governments in Indonesia using the Stochastic Frontier Approach (SFA) approach. Then from the results of the efficiency of the SFA, panel data regression test is done by using factors that are thought to affect the value of efficiency of regional expenditure management.

The results obtained using the SFA approach show that the average level of efficient regional spending on provincial governments in Indonesia in 2013-2017 did not reach perfect efficiency values. Then the results of the panel data regression showed that simultaneous variables of population, GRDP, inflation and the number of public facilities affect the efficiency of regional spending with R-Square of 98%. While partially the number of population variables has a negative and significant effect on the efficiency of regional spending. Then the variable population, inflation and the number of public facilities do not affect the efficiency of regional spending.

Keywords: *Regional expenditure, efficiency, population, GDP, inflation, and the number of public facilities.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Menurut Kumorotomo (2008:5), Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan beban tugas pembangunan, penyediaan layanan publik dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat ke masyarakat. Dengan begitu, kemampuan pemerintah daerah akan dapat ditingkatkan dan pertanggungjawaban akan lebih terjamin. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia di yakini sebagai perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai iklim demokratis terkait dengan pola hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan peran serta masyarakat (Kuncoro, 2013: 282).

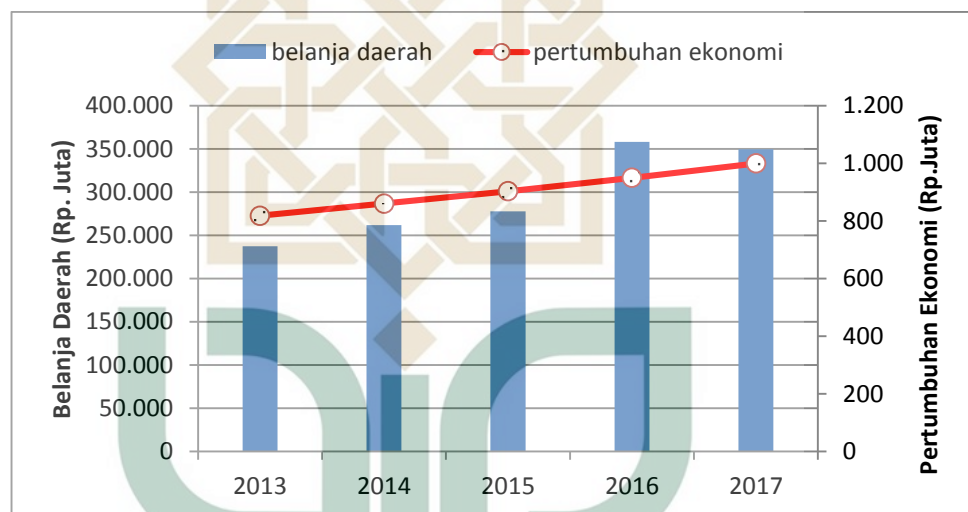
Manajemen keuangan pemerintah menurut Sumarsono (2010:21) manajemen keuangan pemerintah baik yang berkaitan dengan usaha pemerintah untuk mendapatkan dana maupun penggunaan dana untuk pembiayaan operasional atau kebutuhan investasi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini setelah adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak/retribusi daerah dan mengelola

sumber daya alamnya sendiri. Sumber daya keuangan daerah setempat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber daya utama dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) sedangkan sumber daya lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah (Halim, 2007:3).

APBD menurut Adisasmita (2010:62) sebagai instrumen yang akan menjamin terciptanya kedisiplinan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*). Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, belanja modal (Permendagri No. 59 pasal 36 tahun 2007).

Pengeluaran belanja daerah memiliki peranan penting untuk mengukur efisiensi dalam mengelola keuangan pemerintah. Komponen belanja daerah juga berperan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Kondisi belanja daerah di Indonesia saat ini bisa dibilang cukup besar ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik di bawah ini:



Grafik 1.1 Perkembangan Pengeluaran Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Indonesia 2013-2017 (Juta Rupiah)

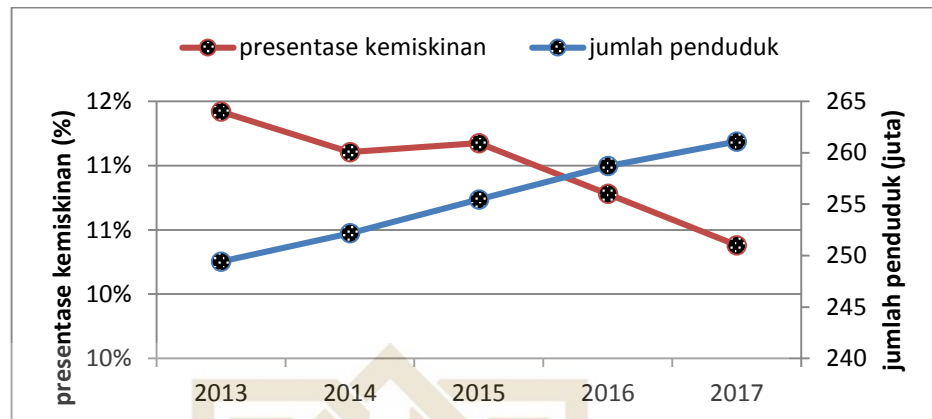
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan bahwa pengeluaran belanja daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2013-2017 mengalami *trend* kenaikan setiap tahunnya, dan juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada setiap tahunnya. Pengeluaran belanja daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah juga sangat berperan penting dalam usaha

mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah memproyeksikan anggaran sangat besar untuk mengeluarkan belanja daerah.

Santoso (2011:4) menyatakan bahwa meskipun anggaran belanja daerah relatif naik setiap tahun dan juga diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Namun pengelolaan anggaran belanja daerah yang ada belum mampu di kelola secara efisien. Hal ini dilihat dari pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek efisiensi dan efektivitas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomer 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD, belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Sehingga diperlukan adanya analisis belanja daerah yang digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Mahmudi, 2010:156).

Dalam belanja daerah, alokasi anggaran terhadap tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 10,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perlu diulas dalam penelitian ini.



Grafik 1.2 Presentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk pada Provinsi Indonesia 2013-2017 (Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia bertambah pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia mengalami peningkatan dengan dibuktikan jumlah kemiskinan di Indonesia yang semakin menurun. Pada tahun 2015 kemiskinan sempat mengalami kenaikan namun kembali mengalami penurunan drastis pada tahun 2016. Dapat diartikan kebijakan desentralisasi fiskal lambat laun dirasa mampu mengentaskan kemiskinan. Kebijakan desentralisasi fiskal sendiri bertujuan untuk memampukan keuangan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum (Saragih, 2003).

Presentase kemiskinan pada provinsi di Indonesia bisa dibilang tidak merata. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2013-2017 Provinsi Papua merupakan daerah dengan jumlah kemiskinan tertinggi di Indonesia sebesar 28,9%. Sedangkan provinsi dengan jumlah kemiskinan terendah di Indonesia sebesar 3,6% pada provinsi DKI Jakarta. Bila dibandingkan antara provinsi Papua dan DKI Jakarta sangat tertinggal jauh. Selain itu, presentase

kemiskinan juga dialami oleh daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 21,2%. Dimana presentase kemiskinan pada provinsi NTT menjadikan tingkat kemiskinan tertinggi setelah pulau papua. Menurut Purnama (2018) hal ini diakibatkan daerah tersebut tertinggal cukup lama atau dapat dikatakan Indonesia bagian timur masih kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2016) menunjukkan bahwa kecenderungan kenaikan alokasi anggaran belanja daerah mengakibatkan presentase penduduk miskin mengalami penurunan. Sehingga menjadi isu penting apakah belanja daerah diprioritaskan pada urusan yang berpengaruh positif terhadap usaha pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Amran dkk (2014) pengujian sendiri-sendiri variabel belanja langsung dan dana alokasi umum terhadap kemiskinan memiliki pengaruh secara signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan. begitu pula dalam pengujian secara gabungan, dimana secara bersama-sama variabel belanja langsung, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kota Manado pada tahun 2004-2012. Selanjutnya penelitian Wiguna (2016) menunjukkan bahwa variabel PDRB dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010.

Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu (2011) menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas (Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran) secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini diteliti di Kabupaten/Kota Jawa Tengah menggunakan data panel dengan model terpilih yaitu pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Selain itu, penelitian Elvi (2016) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Kemudian secara simultan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Pentingnya pemerintah provinsi dalam mengelola sektor keuangan daerahnya menjadi hal yang menarik untuk diamati terutama pengelolaan pengeluaran Belanja Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efisiensi Pengelolaan Pengeluaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh beberapa rumusan masalah, diantaranya:

- a. Bagaimana pencapaian efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2013-2017 berdasarkan hasil analisis metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA)?

- b. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia?
- d. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap tingkat efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia?
- e. Bagaimana pengaruh jumlah fasilitas publik terhadap tingkat efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mengukur tingkat efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2013-2017 berdasarkan hasil analisis metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA).
- b. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia.

- d. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap tingkat efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia.
- e. Untuk menganalisis pengaruh jumlah fasilitas publik terhadap tingkat efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penelitian mengenai kondisi dan tingkat efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia.

- b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam mengelola pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia yang lebih baik.

- c. Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan belanja daerah dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, sistematika penyusunannya terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing bab akan dijelaskan secara garis besar, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan; menjelaskan secara umum latar belakang masalah dari kasus yang akan diteliti, isu-isu yang dimunculkan terkait penelitian.

Bab II merupakan bagian landasan teori. Bagian landasan teori ini memuat telaah pustaka yang berisi tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait kemiskinan serta perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, dibahas juga kerangka teoritik yang berisi teori-teori terkait penelitian. Pada bab kedua ini dibahas pula mengenai hipotesis penelitian.

Bab III merupakan bagian metode penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana metode penelitian yang digunakan meliputi uraian terkait jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, model analisis, dan pengujian hipotesis.

Bab IV merupakan bagian pembahasan. Bagian pembahasan menguraikan atau mendeskripsikan hasil-hasil analisis dari beberapa pengujian yang telah ditentukan serta menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil analisis (diterima atau tidaknya suatu hipotesis).

Bab V merupakan bagian penutup. Bagian penutup berisikan tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada analisis tingkat efisiensi 33 Provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA) pada periode 2013-2017 didapatkan hasil bahwa secara umum tingkat efisiensi belanja daerah pada 33 Provinsi di Indonesia tersebut memiliki trend yang fluktuatif. Secara individu, Provinsi Papua memiliki tingkat efisiensi rata-rata paling tinggi dengan skor 52,18%, Sedangkan Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata tingkat efisiensi paling rendah dengan skor 39,28%. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi belanja daerah pada Provinsi di Indonesia selama tahun 2013-2017 belum efisien dengan skor 43,4%. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah di provinsi DKI Jakarta sangat pesat dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga dalam hal pengeluaran anggarannya semakin defisit (in-efisien). Hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi Papua dalam hal pembangunan daerahnya yang relatif rendah. Sehingga pemerintah Provinsi Papua dalam hal pengelolaan pengeluaran belanja daerah paling efisien dibandingkan provinsi yang lain di Indonesia.

2. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka tingkat efisiensi belanja daerah akan semakin rendah namun jumlah penduduk tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah.
4. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi, maka tingkat efisiensi belanja daerah akan semakin rendah.
5. Jumlah fasilitas pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semakin bertambah jumlah fasilitas pendidikan maka semakin rendah efisiensi belanja daerah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah provinsi di Indonesia yang belum mencapai tingkat efisiensi perlu melakukan perbaikan pada *input* maupun *output*-nya. Dari sisi *input*, disarankan pengeluaran yang dilakukan tepat sasaran supaya tidak terjadi pemborosan ataupun inefisiensi. Sedangkan dari sisi *output*, banyak

Provinsi di Indonesia yang tingkat efisiensinya sangat rendah. Sehingga, dalam mencapai efisiensi perlu menambah jumlah *output* tertentu.

2. Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Provinsi di Indonesia hendaknya perlu meningkatkan program pembangunan daerah yang merata pada infrastruktur, sosial, dan pendidikan.
3. Pengelolaan belanja daerah yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah. Untuk itu diperlukan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan belanja daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Adisisasmita, Raharjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisisasmita, Raharjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2008), hlm. 138.
- Al Arif, Nur Rianto. 2010. *Teori Makro Islam (Konsep, teori, dan Analisis)*. Bandung: Alfabeta.
- Amran, Dkk. 2014. "Pengaruh dana alokasi umum dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Kota Manado". *Jurnal Efisiensi*, Vol. 14 No. 3 Hal. 39-40, Oktober 2014.
- B. Jakovljevic, Mihajlo dkk. 2015. "Harapan hidup dan evolusi pengeluaran kesehatan Eropa Timur". *Journal Internasional*, Vol. 10, No. 15 Hal. 41-43, 17 Desember 2015.
- Barnawi dan M. Arifin, *Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), hal. 49.
- Bayu, Rendi, 2016. "Pengaruh belanja daerah dan kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan". *Jurnal Akutansi* Vol. 4, No. 11, Hal. 69-71, Oktober 2016.
- Budiarta, Dwi Kurnia. 2016. "Pengaruh DAU, DAK, Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota Sumatera". *Jurnal Ekonomi* Vol.6, No.9, Hal.20, 15-01-2016.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta Barat: PT Indeks.

- Darmono, *Perpustakaan Sekolah : Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Kerja*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 1.
- Dicky, Djatnika. 2009. "Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan". *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, hal. 1-12, Januari 2009.
- Dzemydaite, Giedre. 2016. "Efisiensi Sistem Inovasi Regional di Negara-Negara Anggota Baru Uni Eropa". *Jurnal Ekonomi*, Vol 10.1515 / eb-2016-0012.
- Frida S, Asnita. 2005. "Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah di Indonesia Pasca Krisis". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 3, Hal 7-8, Desember 2005.
- Gujarati., & Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gorahe dkk, 2014. "Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Ekonomi Regional*, Vol. 7, No.3, Hal 14-15.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akutansi Sektor Publik : Akutansi Keuangan Dearah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Hamka. 2007. *Tafsir Al-Azhar Juz XV*: Jakarta.
- Hermawan, Puguh dkk. 2016. "Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Publik (studi kasus : 38 kabupaten/kota di jawa timur 2006-2010)". *Jurnal Ilmiah* Vol 1, No 2, Hal. 1-12.
- Hua-Wei, HAN dan Yan-qing, MIAO. 2010. "Perhitungan Efisiensi Pengeluaran Kesehatan Daerah dan Studi Empiris tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya". *Jurnal Keuangan dan Ekonomi*, Vol. 2, No, 1. Hal. 22-23.
- I Putu, B. Dwirandra. 2014. "Pengaruh pendapatan daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 7 No. 79, Hal. 1-14.

- Kamaruddin, Badrul Hisham, et.al. 2008. "Assesing Producing Efficiency Of Islamic Banks and Conventional Bank Islamic Windows in Malaysia". *International Journal of Business and Management Science*, Vol 1, No.1, Hal. 31-48.
- Kristiyanto, Sony dan Sugeng Widodo. 2017."Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* Vol. 17, No 1, Hal 1-14 Maret 2017.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta. Kencana.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : YKPN.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke-2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi*. edisi keenam. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005. *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan-Ekonomi Ummat*. Yogyakarta: UII Pres.
- Muhtadi Ridwan. 2012. *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. Malang:Uin maliki Press.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. Buku 2. Jakarta : BPFE
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnama, Nurviana. 2018. "Analisis kemiskinan di Provinsi Papua" *Jurnal Pembangunan*, Vol 1 No. 1 Hal. 1-14.

- Putri, Aristyasani. 2015. “Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Propinsi Jawa Barat”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4 No. 2, Hal. Oktober 2015.
- Prakoso, Yulian. 2011. Pengaruh PAD, DAU, dan PDRB terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, Vol 2, No. 1, Halaman 13-14.
- Priyo, Adi. 2015. Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran terhadap kemiskinan di kota Yogyakarta. *Jurnal Regional*, Vol 4, No 1, Halaman 1-12.
- Rudy Badrudin. 2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Robinson Tarigan. 2005. *Ekonomi Regional*. Jakarta:PT Bumi.
- Santoso, Eko. 2011. “Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Ngawi”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 8 No. 4, Hal. 1-15.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonom*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sjafrial. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 393.
- Siswanto, 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Todaro, M.P.& Smith, S.C. (2003). *Economic Development*. Boston: Addison Wesley.
- Vincent, Briant. 2009. *The Concept Provety Towards Understanding In The Context Of Developement*. 2(2).
- Waluyo, Eko Dwi. Yuliani, Uci. 2013 *Ekonomika Makro*. Malang : UMM Pers.

- Widarjono, Agus 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Wiguna, Indra. 2016. "Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah". *Jurnal ilmiah*, Vol. 1, No. 2, Hal 13-14.
- Wisnu, Adhi. 2011. "Analisis pengaruh jumlah penduduk, Pdrb, Ipm, Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4, No 2, Hal 14-19, 27 Mei 2011.
- Wulandari dkk, 2013. "Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali". *E-Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol 2, No. 11, Hal 1-12.
- Y. Yunan, Zuhairan. 2014. "Tingkat Efisiensi pengeluaran pemerintah di Pulau Jawa". *Jurnal Ekonomi* Vol. 3 No. 1 Hal 1-12 April 2014.
- You Li, Yong. 2010. "Perubahan Struktural dan Efisiensi Pengeluaran Fiskal Tiongkok". *Journal Internasional*, Vol. 6 No.4 Hal 1-12.
- Yuliati. 2000. *Akutansi Sektor Publik*. cetakan kelima. Salemba empat. Jakarta. Hlm. 97.
- Zhong, Wei dkk. 2010. "Evaluasi Kinerja Investasi Litbang Regional di Tiongkok". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 39, No 2, hal 21-24.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA